



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 141/259 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN
DI KECAMATAN BUKIT RAYA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Bukit Raya perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Rantau Pandan di Kecamatan Bukit Raya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Pergantian Anggota Mantir Adat Desa Rantau Pandan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 21/DAD-KAT/IV/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu Mantir Adat Desa Rantau Pandan Kecamatan Bukit Raya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9 cf k

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN DI KECAMATAN BUKIT RAYA.
- KESATU :** Mantir Adat Desa Rantau Pandan di Kecamatan Bukit Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Masa Jabatan Mantir Adat Desa Rantau Pandan di Kecamatan Bukit Raya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Agustus Tahun 2027;
- KETIGA :** Kepada Mantir Adat Desa Rantau Pandan di Kecamatan Bukit Raya diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT :** Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 9 Mei 2022



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Bukit Raya di Tumbang Kajamei.

9

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 141/259 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGESAHAN
 MANTIR ADAT DESA
 DI KECAMATAN
 PENGANGKATAN
 RANTAU PANDAN
 BUKIT RAYA

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HONUT	MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN	MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN	BUKIT RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar Camat Bukit Raya Nomor 220/53/Pem-BR/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021. - Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 041/DAD-Kat/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
2.	MARGANA	-	MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN	BUKIT RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Pergantian Anggota Mantir Adat Desa Rantau Pandan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan tanggal 11 Maret 2022.
3.	EPING	-	MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN	BUKIT RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Pengantar Kepala Desa Rantau Pandan Nomor 140/31/Pem-Des/RP/III/2022 tanggal 11 Maret 2022. - Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 21/DAD-KAT/IV/2022 tanggal 13 April 2022.
4.	TAPANG	MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN	-	BUKIT RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama TAPANG, yang ditujukan kepada Bupati Katingan pada tanggal 6 Januari 2022.
5.	ATANG S. DARE	MANTIR ADAT DESA RANTAU PANDAN	-	BUKIT RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Atang S. Dare yang ditujukan kepada Bupati Katingan pada tanggal 10 Maret 2022.

BUPATI KATINGAN,



 SAKARIYAS

9 k